

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi (*agency theory*), atau yang biasa juga disebut *contracting theory*, merupakan salah satu aliran riset akuntansi terpenting dewasa ini. Penelitian atas teori agensi bisa bersifat deduktif atau induktif dan merupakan kasus khusus riset perilaku, meskipun teori agensi berakar pada bidang keuangan dan ekonomika bukannya psikologi dan sosiologi. Asumsinya adalah individu bertindak demi kepentingannya sendiri. Asumsi lainnya menyebutkan bahwa entitas merupakan tempat atau titik pertemuan bagi berbagai jenis hubungan kontraktual yang terjadi di antara manajemen, pemilik, kreditur dan pemerintah.¹

Jensen dan Meckling (1986)² disingkat dengan JM mengemukakan teori *agency* dan sekaligus mengintegrasikan dengan teori *property rights* dan pengembangan teori struktur kepemilikan perusahaan. Teori *agency* ini menguraikan adanya hubungan antara pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan (*separation ownership and control*). JM menguraikan adanya konflik antara *principal* dan agen yang dapat dikategorikan ke dalam tiga hal yaitu konflik antara pemegang saham (*principal*) dengan agen (dewan direksi) dan konflik antara pemegang obligasi (*principal*) dan agen (dewan direksi dan pemilik perusahaan) serta konflik antara produsen dan konsumen.

¹ Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan*, (Yogyakarta: Erlangga, 2006), hlm. 213

² Adler Haymans Manurung, *Cara Menilai Perusahaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 41

Teori ini menyebutkan biaya agensi merupakan hasil jumlah dari, pengeluaran untuk pemantauan (*monitoring*) oleh pemilik (*principal*), pengeluaran dalam rangka pengikatan oleh agen dan biaya lain-lain berkaitan dengan pengendalian perusahaan.

B. Manajemen Laba

1. Pengertian Manajemen Laba

Menurut Fisher dan Rosenzweig, Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka pendek.³ Menurut Davidson, Stickney dan Well (1987)⁴, manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan.

Menurut Schiper (1989)⁵, Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal. dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (pihak yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses). Sedangkan dalam *National Association of Found Examiners* (1993)⁶, menyatakan bahwa manajemen laba ialah kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai

³ H. Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 49

⁴ *Ibid.*, hlm. 48

⁵ *Ibid.*, hlm. 49

⁶ *Ibid.*, hlm. 49

fakta material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan yang menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya.

2. Model Empiris Manajemen Laba

Secara umum ada tiga kelompok model empiris manajemen laba yang diklasifikasikan atas dasar basis pengukuran yang digunakan, yaitu model yang berbasis akrual agregat (*aggregate accrual*), akrual khusus (*specific accruals*) dan distribusi laba (*distribution of earnings*).⁷

- a) Model berbasis akrual merupakan model yang menggunakan *discretionary accrual* sebagai proksi manajemen laba. Model manajemen laba ini dikembangkan oleh Healy (1985), DeAngelo (1986), Jones (1991), serta Dechow, Sloan, dan Sweeney (1995).
- b) Model yang berbasis *specific accruals*, yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan keuangan tertentu dari industri tertentu pula. Model ini dikembangkan oleh McNichols dan Wilson, Petroni, Beaver dan Engel, Beneish, serta Beaver dan McNichols.
- c) Model *distribution of earnings* dikembangkan oleh Burgtähler dan Dichev, DeGeorge, Patel, dan Zeckhauser, serta Myers dan Skinner.

⁷ *Ibid.*, hlm. 7

3. Manajemen Laba dalam Persepektif Islam

Jika dilihat dari pengertian-pengertian diatas, manajemen laba tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam hal berbisnis. Ada empat pilar etika manajemen bisnis yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni:⁸ Tauhid, keseimbangan, kehendak bebas (sepanjang memenuhi aturan syariah), bertanggung jawab dan kebenaran

a. Keesaan (*Tauhid/Unity*)

Adalah integrasi antar semua bidang kehidupan, demikian juga kesatuan antara kegiatan bisnis dengan moralitas dan pencarian ridha Allah. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang agama, ekonomi, politik, sosial dan budaya menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Konsep keesaan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim:

- 1) Karena seorang muslim memandang apapun yang ada di dunia sebagai milik Allah SWT, Tuhan yang juga memilikinya, pemikiran dan perilakunya tidak dapat dibiaskan oleh apapun juga. Pandangannya menjadi lebih luas dan pengabdianya tidak lagi terbatas kepada kelompok atau lingkungan tertentu. Segala bentuk pandangan

⁸ Yosy Arisandi, *Manajemen Laba dalam Persepektif Islam*, Jurnal Mizani, vol. 25, no. 2, 2015, hlm.

rasisme atau sitem kasta menjadi tidak konsisten dengan pemikirannya.

- 2) Karena hanya Allah yang maha kuasa dan maha Esa, maka kaum muslim berbeda dengan kaum yang lainnya, terbebas dari dan tidak takut akan semua bentuk kekuasaan lain kecuali Allah SWT. Ia tidak pernah disilaukan oleh kebesaran orang lain, dan tidak membiarkan dirinya dipaksa untuk bertindak tidak etis oleh siapapun. Karena Allah SWT dapat mengambil dengan mudah apapun yang telah ia berikan, maka kaum muslim akan bersikap rendah hati dan hidup sederhana.
- 3) Karena ia percaya bahwa hanya Allah SWT yang dapat menolongnya, ia tidak pernah merasa putus akan datangnya pertolongan dan kemurahan Allah SWT. Tidak ada manusia atau binatang apapun yang memiliki kekuasaan untuk mengambil nyawanya sebelum waktu yang digariskan-Nya; hanya Allah SWT yang memiliki kekuasaan untuk mengambil nyawanya. Ia akan bertindak penuh keyakinan dan keberanian untuk apa yang ia anggap etis dan islami.
- 4) Pengaruh paling besar dari ucapan *la ilaha illa Allah* adalah bahwa kaum muslim akan mentaati dan melaksanakan hukum-hukum Allah SWT. Ia percaya bahwa Allah mengetahui segalanya yang terlihat ataupun yang tersembunyi, dan bahwa ia tidak dapat menyembunyikan apapun, niat ataupun tindakan dari Allah SWT.

Sebagai konsekuensinya, ia akan menghindarkan diri dari apa yang dilarang, dan berbuat hanya dalam kebaikan.

Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

b. Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. Dalam beraktifitas di dunia kerja dan bisnis, islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Prakteknya dalam bisnis :

- 1) Tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan.
- 2) Penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal.

c. Kehendak bebas (*Free Will*),

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Aplikasinya dalam bisnis :

- 1) Konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Walaupun ada persaingan dalam usahamaka, itu berarti persaingan dalam berbuat kebaikan atau *fastabiq al-khairat* (berlomba-lomba dalam kebajikan).
- 2) Menepati kontrak, baik kontrak kerja samabisnis maupun kontrak kerja dengan pekerja. Dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Aqad (perjanjian) mencakup: janji setia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

d. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakanya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Aplikasinya dalam bisnis:

- 1) Upah harus disesuaikan dengan UMR (upah minimum regional).
- 2) *Economic return* bagi pemebri pinjaman modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan

jumlahnyadan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sistem bunga.

- 3) Islam melarang semua transaksi alegotorisseperti gharar, system ijon, dan sebagainya.

e. Kebenaran (*Benevolence*):

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan yaitu mengandung kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Aplikasinya dalam bisnis menurut Al-Ghazali :

- 1) Memberikan zakat dan sedekah.
- 2) Memberikan kelonggaran waktu pada pihakterutang dan bila perlu mengurangiibebanutangnya.
- 3) Menerima pengembalian barang yang telahdibeli.
- 4) Membayar utang sebelum penagihan datang.
- 5) Adanya sikap kesukarelaan antara kedua belahpihak yang melakukan transaksi, kerja samaatau perjanjian bisnis.
- 6) Adanya sikap ramah, toleran, baik dalammenjual, membeli dan menagih utang.

- 7) Jujur dalam setiap proses transaksi bisnis.
- 8) Memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.

Penjelasan Al-Quran mengenai larangan mengambil keuntungan dari jalan menipu diantaranya Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

4. Manajemen Laba dalam Persepektif Informasi

Persepektif informasi merupakan pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan kebijakan manajerial untuk mengungkapkan harapan pribadi manajer tentang arus kas perusahaan dimasa depan. Upaya mempengaruhi informasi itu dilakukan dengan memanfaatkan kebebasan untuk memilih, menggunakan dan mengubah berbagai metode akuntansi yang ada. Mengubah metode yang dipakai berarti mengubah nilai seperti yang dikehendaki orang itu. Oleh sebab itu,

manajemen laba dapat dikatakan sebagai permainan akuntansi (*accounting games*)⁹

5. Manajemen Laba dalam Persepektif Oportunis

Persepektif oportunis merupakan pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan perilaku oportunis manajer untuk mengelabui investor dan memaksimalkan kesejahteraannya karena menguasai informasi lebih banyak di bandingkan pihak lain. Upaya menyembunyikan, menunda pengungkapan dan mengubah informasi ini dipandang sebagai kecurangan (*fraud*) seorang manajer dalam melaporkan kinerjanya. Alasannya, upaya ini dilakukan manajer untuk menyesatkan pihak lain yang ingin mengetahui dan menilai kinerja dan kondisi perusahaan. Apalagi jika upaya itu merupakan tindakan-tindakan manajerial yang disengaja untuk menipu pihak lai yang menyebabkan kehilangan kekayaan.¹⁰

Hilangnya kekayaan yang disebabkan manajemen laba dapat mengakibatkan kesalahan alokasi sumber daya. Manajer tidak bisa mengalokasikan apa yang telah didapatya kepada pihal-pihak yang tepat. Hingga investor kehilangan kesempatan memperoleh deviden, kreditur dan supplier memperoleh kesempatan pengembalian pinjaman dan bunganya, serta pemerintah yang kehilangan kesempatan memperoleh sejumlah pajak. Oleh sebab itu persepektif ini dinilai sejalan dengan teori

⁹ H. Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*, (Jakarta: Grasindo,2008), hlm. 10

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 19

agensi yang menyatakan bahwa pemisahan kepemilikan akan mendorong setiap pihak berusaha memaksimalkan kesejahteraan masing-masing.¹¹

6. Permainan Manajerial

Ada beberapa cara yang dilakukan perusahaan untuk memperlakukan besar kecilnya laba, yaitu sebagai berikut:¹²

- a) Mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu periode atau lebih.
- b) Mencatat pendapatan palsu.
- c) Mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lebih lambat.
- d) Tidak mengungkapkan semua kewajiban.

Untuk mendeteksi ada tidaknya manajemen laba dalam perusahaan Penggunaan pengukuran atas dasar akrual sangat penting untuk diperhatikan. Total akrual adalah selisih antara laba dan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Total akrual dapat dibebankan menjadi dua bagian, yaitu:¹³

- a) Bagian akrual yang memang sewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan keuangan, disebut *normal accruals* atau *non discretionary accruals*;
- b) Bagian akrual yang merupakan manipulasi data akuntansi yang disebut dengan *abnormal accruals* atau *discretionary accruals*.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 20

¹² H. Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 33

¹³ Taufik Hidayat, *Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Earning Management (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013 – 2015)*, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 28

7. Alat Ukur Manajemen Laba

Alat ukur manajemen laba atau lebih dikenal model empiris bertujuan untuk mendeteksi manajemen laba, pertama kali dikembangkan oleh Healy, De angelo, model Jones serta model Jones dengan modifikasi.

a) Model Healy

Model empiris untuk mendeteksi manajemen laba pertama kali dikembangkan oleh Healy pada tahun 1985. Secara umum model ini tidak berbeda dengan model-model lain yang digunakan untuk mendeteksi manajemen laba dalam menghitung nilai total akrual (TAC), yaitu mengurangi laba akuntansi yang diperoleh selama satu periode dengan arus kas operasi periode bersangkutan.¹⁴

b) Model De Angelo

Model lain untuk mendeteksi manajemen laba dikembangkan oleh De Angelo pada tahun 1986. Secara umum model ini juga menghitung total akrual (TAC) sebagai selisih antara laba akuntansi yang diperoleh suatu perusahaan selama satu periode dengan arus kas periode bersangkutan. Seperti halnya model Healy, model De Angelo juga menggunakan total akrual periode estimasi sebagai proksi *expected noniscretionary accruals*.¹⁵

¹⁴ Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008) hlm.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 219

c) Model Jones

Model Jones dikembangkan oleh Jones pada tahun 1991, model ini tidak lagi menggunakan asumsi bahwa *nondiscretionary accruals* adalah konstan. Model Jones ini mengusahakan untuk mengendalikan pengaruh perubahan kondisi perekonomian perusahaan terhadap *nondiscretionary accruals*.¹⁶ Selain itu, model ini menggunakan dua asumsi sebagai dasar pengembangan.

1. Akrua periode berjalan (*current accrual*).
2. Gros property, plant and equipment.

d) Model Jones Dimodifikasi

Model Jones dimodifikasi merupakan modifikasi dari model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan *discretionary accrual* ketika *discretion* melebihi pendapatan. Sama halnya model manajemen laba berbasis *aggregate accruals* yang lain model ini menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba.¹⁷

Pada penelitian ini pengukuran manajemen laba ini menggunakan *discretionary accrual* dari model De Angelo. Model ini digunakan karena melihat banyak kasus yang mana nilai *nondiscretionary accrual* selalu konstan setiap saat dan *discretionary accruals* mempunyai rata-rata sama

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 221

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 225

dengan nol selama periode estimasi, maka model ini akan mengukur discretionary accrual tanpa kesalahan dan jika nondiscretionary accruals mengikuti random walk maka model De Angelo yang lebih tepat.¹⁸ Adapun langkah-langkah rumus model *De Angelo* sebagai berikut¹⁹:

Langkah pertama : Menghitung nilai total akrual (TAC) dengan cara pendapatan bersih (*net income*) dikurangi dengan arus kas operasi pada setiap tahun pengamatan.

$$\text{TAC} = \text{Net Income} - \text{Cash Flow From Operation}$$

Langkah kedua : Menghitung nilai *non discretionary accrual* (NDA) dengan cara rata-rata total akrual (TAC) dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

$$\text{NDA}_t = \text{Rata-rata TAC} / \text{TA}_{t-1}$$

Langkah ketiga : Menghitung nilai *discretionary* dengan cara, menghitung selisih dari total akrual (TAC) dengan *non discretionary accrual* (NDA).

$$\text{DA} = \text{TAC} - \text{NDA}$$

C. Good Corporate Governance

1. Pengertian *Corporate Governance*

Menurut Bank Dunia (*World Bank*). pengertian *good corporate governance* (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi

219 ¹⁸ Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008) hlm.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 220

jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.²⁰

Lembaga *corporate governance* di Malaysia, yaitu *Finance Committee on Corporate Governance (FCCG)*, mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.²¹

Menurut *Turnbull Report (2004)*²² *good corporate governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI)*, *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Istilah

²⁰ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 2

²¹ *Ibid.*, hlm. 2

²² Tsuguki Fujinuma, *Enhancing Corporate Governance-IFAC's Initiatives and the Role of the Accountancy Profession*, Makalah dipresentasikan pada Konvensi Nasional Akuntansi IV, (Prosiding Paradigma Baru Profesi Akuntan Memasuki Milenium Ketiga: Good Governance, IAI, Buku Dua Cetakan Pertama, April 2001), hlm. 545.

corporate governance ini muncul karena adanya *agency theory*, di mana kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan.²³

Menurut kementerian BUMN sesuai Pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/ MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, disebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.²⁴

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, secara singkat tata kelola perusahaan atau *corporate governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. *Corporate governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional (BTP).²⁵

2. Corporate Governance dalam Persepektif Islam

Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai *Good Corporate Governance* berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang

²³ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat,2016), hlm. 3

²⁴ *Ibid.*, hlm. 3

²⁵ *Ibid.*, hlm. 3

artinya “*Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik*”.

Muqorobin menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini:²⁶

1) Tauhid

Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktifitas Umat Islam, baik dibidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya.²⁷ Dalam Alquran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari Ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Az Zumar ayat 38 :

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي

بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?", niscaya mereka menjawab: "Allah". Katakanlah: "Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu,

²⁶ Muqorobin Masyudi, *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar*, (Purwekerto: Universitas Muhammadiyah) hlm.4

²⁷ Amiur Nuruddin, Veithzal Rivai, *Islamic Business and economic Ethic* (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), Hlm. 52

atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?. Katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku". Kepada-Nya-lah bertawakkal orang-orang yang berserah diri”.

Tauhid juga berarti penyerahan diri sepenuhnya kehendak Ilahi. Baik menyangkut ibadah maupun Muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah.

Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.²⁸

2) Taqwa dan Ridha

Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun azas taqwa kepada Allah dan ridha-Nya. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas fondasi taqwa kepada Allah dan ridha-Nya dalam QS at-Taubah ayat 109:

²⁸ Mardani., *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana. 2012), hlm. 17

أَقْمَنُ أَسَسَ بُنْيَانَهُ وَعَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّ مَنْ أَسَسَ

بُنْيَانَهُ وَعَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾

“Maka apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

Dalam hal berbisnis dasar suka sama suka atau sukarela suatu yang wajib dilakukan. Salah jika suatu perbuatan muamalah, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Dan ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.

3) Keseimbangan dan Keadilan

Tawazun atau *mizan* (keseimbangan) dan *al-‘adalah* (keadilan) adalah dua buah konsep keseimbangan dalam Islam. *Tawazun* lebih digunakan untuk menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang kemudian sering menjadi wilayah *al-‘adalah* atau

keadilan sebagai manifestasi Tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah SWT berfirman dalam QS ar-Rahman ayat 7-9 :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ

بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“7) Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). 8) Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. 9) Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”

4) Kemaslahatan

Menurut para ahli ushul fiqh Kemaslahatan adalah sebagai segala sesuatu yang mengandung kebaikan, manfaat dan menghindarkan dari kerusakan, mudharat dan mufsadah. Imam al Ghazali menyimpulkan bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni: pemeliharaan agama (*hifdzud-din*); pemeliharaan jiwa (*hifhzun-nafs*); Pemeliharaan akal (*hifhzul-‘aql*); Pemeliharaan keturunan (*hifhzun-nasl*); Pemeliharaan harta benda (*hifhzul-maal*).²⁹

²⁹ Amiur Nuruddin, Veithzal Rivai, *Islamic Business and economic Ethic*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), Hlm. 58

3. Konsep *Good Corporate Governance*

Pada dasarnya, GCG diterapkan pada dua sektor korporasi, yaitu pasar modal dan badan usaha milik negara (BUMN). Konsep *good corporate governance* menurut BUMN berdasarkan penjelasan UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN disebutkan:³⁰

- 1) Untuk dapat mengoptimalisasikan peranannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme, antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- 2) Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memenuhi visi pengembangan BUMN di masa yang akan datang dan meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan BUMN. Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia, antara lain disebabkan perusahaan-perusahaan di negara

³⁰ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 6

tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten;

- 3) Undang-undang BUMN dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik. Undang-undang ini juga dirancang untuk menata dan mempertegas peran lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal BUMN, serta mempertegas dan mempeljelas hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator.

4. Tujuan *Good Corporate Governance*

Terdapat 6 (enam) tujuan dalam penerapan GCG menurut BUMN, yaitu sebagai berikut:³¹

- 1) Untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
- 2) Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.

³¹ Ibid., hlm. 7

- 3) Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para pemangku kepentingan ataupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan.
- 4) Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.
- 5) Meningkatkan iklim investasi nasional.
- 6) Menyukseskan program privatisasi.

5. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip *Corporate Governance* biasanya dikenal dengan singkatan *TARIF*, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness*. Berikut penjelasan singkat dari masing-masing prinsip *corporate governance* tersebut:³²

- 1) *Transparency* (transparansi), mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional dan kepemilikan perusahaan.
- 2) *Accountability* (akuntabilitas), dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggungjawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan

³² *Ibid.*, hlm. 11

manajemen dan pemegang saham sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.

- 3) *Responsibility* (responsibilitas), perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik.
- 4) *Independency* (independensi), setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.
- 5) *Fairness* (kesetaraan), terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula.

Untuk mengukur *Good Corporate Governance*, peneliti menggunakan komposisi ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

1) Ukuran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.³³ Dalam peraturan otoritas jasa keuangan (OJK) no. 33/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, pada pasal 20 mengatur tentang keanggotaan dewan komisaris sebagai berikut:

- a) Dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris.
- b) Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, 1(satu) diantaranya adalah komisaris independen atau 30% dari jumlah dewan komisaris.
- c) Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.
- d) Satu (1) di antara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.³⁴

Untuk menghitung ukuran dewan komisaris, dilihat dari jumlah komisaris yang ada di perusahaan tersebut.

³³ Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, pasal 1 ayat 6

³⁴ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat,2016), hlm. 37

2) Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali. Komisaris independen berjumlah proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh yang bukan pemegang saham pengendali. Ketentuannya adalah jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya harus 30% dari seluruh anggota komisaris. Komisaris independen juga dapat merangkap sebagai ketua komite audit.³⁵ Menurut pasal 28 UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN menyebutkan bahwa, dewan komisaris adalah orang yang diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.³⁶ Syarat-syarat untuk menjadi komisaris independen adalah sebagai berikut.³⁷

- 1) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.

³⁵ Mohammad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, (Surabaya: Erlangga, 2006), hlm.72

³⁶ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 32

³⁷ Mohammad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, (Surabaya: Erlangga, 2006), hlm.72

- 2) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur atau dengan komisaris lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- 3) Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lain yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- 4) Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Istilah independen pada komisaris independen bukan berarti menunjukkan bahwa komisaris lain tidak independen. Namun, istilah komisaris independen menunjukkan bahwa keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya, misalnya investor.³⁸ Otoritas jasa keuangan (OJK) telah menetapkan Peraturan no. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, pada pasal 20 mengatur tentang keanggotaan dewan komisaris yakni, Dewan komisaris paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris.³⁹ Untuk mengukur dewan komisaris independen digunakan rumus sebagai berikut:

$$DKI = \frac{JDKI}{JDK} \times 100\%$$

³⁸ *Ibid.*, hal. 42

³⁹ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 37

Keterangan:

DKI = Persentase dewan komisaris independen

JDKI = Jumlah dewan komisaris independen

JDK = Jumlah dewan komisaris perusahaan

3) Komite Audit

Pembentukan komite audit bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam rangka implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Pembentukan komite tersebut harus ditetapkan melalui suatu surat keputusan (SK) dewan komisaris.⁴⁰ Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang, di mana seorang di antaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan dua anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen, dan salah satu di antaranya harus memiliki kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan.⁴¹

Menurut ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 48

⁴¹ Mohammad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, (Surabaya: Erlangga, 2006), hlm.72

dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksana audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.⁴² Komite audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang meliputi (SK Direksi bursa efek jakarta):

- 1) Menelaah informasi keuangan yang aha dikeluarkan oleh perusahaan seperti laporan keuangan serta proyeksi dan infomasi keuangan Iainnya.
- 2) Menelaah independen dan objektivitas akuntan publik.
- 3) Menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
- 4) Menelaah efektivitas pengendalian internal perusahaan.
- 5) Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan tercatat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan

⁴² Kanaka Puradiredja dkk, *Manual Komite Audit*, (Jakarta: Ikatan Komite Audit Indonesia, 2006), hlm. 4

peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

- 6) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan rapat direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh komite audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh komite audit atas biaya perusahaan tercatat yang bersangkutan.⁴³

Dalam mengukur komite audit, peneliti menggunakan perhitungan jumlah komite audit yang berada di perusahaan.

4) Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional menggambarkan tingkat kepemilikan saham oleh institusional dalam perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *asset management*.⁴⁴ Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic manager*. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional mayoritas mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen.⁴⁵

⁴³ Mohammad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, (Surabaya: Erlangga, 2006), hlm.72

⁴⁴ Hery, *Controllershship: Knowledge and management Approach*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2014), hlm. 172

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 173

Menurut Shien, dkk (2006), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya pada akhir tahun.⁴⁶

Lembaga-lembaga yang yang dimaksud sebagai pemilik institusional yakni berupa perusahaan reksadana, perusahaan dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan yayasan swasta, wakaf atau badan besar lainnya yang mengelola dana atas nama orang lain.⁴⁷ Sesuai peraturan menteri keuangan no. 153 pasal 2 ayat 2, saham perusahaan efek patungan dapat dimiliki oleh badan hukum asing yang bergerak di bidang sekuritas yang telah memperoleh izin atau dibawah pengawasan regulator pasar modal dinegara asalnya maksimal 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor.⁴⁸ Untuk dapat mengukur kepemilikan institusional digunakan rumus sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

Keterangan: KI = Kepemilikan Institusional

⁴⁶ Subagyo, Nur Aini Masruroh dan Indra Bastian, *Akuntansi Manajemen Berbasis Desain*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 47

⁴⁷ Saham Ok, "Pengertian Kepemilikan Institusional Saham", <https://www.sahamok.com/pengertian-kepemilikan-institusional/>, (diakses 8 Februari 2019)

⁴⁸ *Peraturan Menteri Keuangan no. 153 tahun 2010 tentang Kepemilikan Saham dan Permodalan Perusahaan Efek*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

5) Kepemilikan Manajerial

Menurut Sujono dan Soebiantoro (2007), kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen.⁴⁹ Struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan ketidak-seimbangan. Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrumen atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan di antara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Pendekatan ketidak-seimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidak-seimbangan informasi antara *insider* dengan *outsider* melalui pengungkapan informasi didalam perusahaan.⁵⁰

Peran manajemen adalah mengelola pelaksanaan strategi pengembangan produk agar berjalan sesuai rencana dan juga mengkomunikasikan pelaksanaan pengembangan produk kepada seluruh karyawan.⁵¹ Secara umum manajemen terdiri dari tiga tingkatan yaitu sebagai berikut:⁵²

- 1) Manajemen puncak (*top management*). Manajemen puncak adalah manajemen tertinggi. Jenjang manajemen tertinggi atau biasanya

⁴⁹ Subagyo, Nur Aini Masruroh dan Indra Bastian, *Akuntansi Manajemen Berbasis Desain*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 46

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 46

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 48

⁵² *Ibid.*, hlm. 47

terdiri atas dewan direksi dan direktur utama. Dewan direksi mempunyai tugas memutuskan hal-hal yang sifatnya sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Manajemen puncak bertugas menetapkan kebijakan operasional dan membimbing interaksi organisasi dan lingkungan.

- 2) Manajemen menengah (*middle management*). Manajemen menengah biasanya memimpin suatu divisi atau departemen. Tugasnya adalah mengembangkan rencana-rencana operasi dan menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Manajemen menengah bertanggung jawab pada manajemen puncak.
- 3) Manajemen pelaksana (*supervisory management*). Manajemen pelaksana adalah manajemen yang bertugas menjalankan rencana-rencana yang dibuat oleh manajemen menengah. Selain itu, manajemen pelaksana mengawasi para pekerja yang bertanggung jawab pada manajemen menengah.

Ukuran kepemilikan manajerial harus kurang dari 5 %, karena jika manajemen memiliki lebih dari 5% saham akan membuat manajemen menjadi pengendali perusahaan dan bisa berakibat dengan praktik manajemen laba. Untuk mengukur kepemilikan manajerial digunakan rumus sbagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Manajemen}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

Keterangan:

KM = Kepemilikan Manajerial.

D. Financial Leverage

Financial Leverage adalah penggunaan sumber dana yang menimbulkan beban tetap keuangan.⁵³ Utang adalah sumber dana yang menimbulkan beban tetap keuangan, yaitu bunga yang harus dibayar tanpa mempedulikan tingkat laba perusahaan.⁵⁴ *Leverage* keuangan atau faktor leverage dapat diukur berdasarkan nilai buku atau nilai pasar. Leverage keuangan berdasarkan nilai buku diukur dengan rasio nilai buku seluruh utang ($\text{debt} = D$) terhadap total aktiva (TA) sementara *leverage* keuangan berdasarkan nilai pasar diukur dengan rasio nilai buku seluruh utang terhadap terhadap total nilai pasar perusahaan ($\text{total value} = V$).⁵⁵

Total aktiva adalah total nilai buku dari aktiva menurut catatan akuntansi, sedangkan total nilai pasar perusahaan adalah total nilai pasar seluruh komponen struktur keuangan. *Leverage* keuangan berdasarkan nilai pasar lebih banyak digunakan untuk mengembangkan teori keuangan daripada leverage keuangan berdasarkan nilai buku yang lebih banyak digunakan dalam praktik bisnis. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Financial Leverage* adalah sebagai berikut.⁵⁶

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1) Ukuran Perusahaan | 4) Peluang Pertumbuhan |
| 2) Sumber Penghasilan | 5) Biaya Utang |
| 3) Tingkat Jaminan | 6) Likuiditas |

⁵³ Agnes Sawir, *Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasi Perusahaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2004), hlm. 10

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 10

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 10

⁵⁶ Lyna Yuliana dan Etna Nur Afri Yuyetta, *Analisis faktor yang mempengaruhi Leverage Perusahaan*, *Jurnal Akuntansi*, vol. 6, no. 3 tahun 2017, hal. 1-13

Terdapat dua alat ukur untuk mengukur *financial leverage*, yaitu debt to asset ratio dan debt to equity ratio.

1) Debt to Asset Ratio

Rasio ini merupakan perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Sehingga rasio ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Rasio ini memperlihatkan proposi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki.⁵⁷

2) Debt to Equity Ratio

Rasio hutang modal menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar dan merupakan rasio yang mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai dari hutang.⁵⁸

Untuk menghitung Financial Leverage, peneliti menggunakan perbandingan antara total hutang dengan total aset. Perbandingan ini dipilih karena dapat mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan dibiayai dengan total hutang. Suatu perusahaan dikatakan sehat apabila perusahaan tersebut memiliki aktiva dan kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:⁵⁹

$$\text{Debt to Ratio} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

⁵⁷ Hendy M. Fakhruddin, *Istilah Pasar Modal A-Z*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo: 2008), hlm. 47

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 48

⁵⁹ Taufik Hidayat, *Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Earning Management (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013 – 2015)*, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatillah, 2015), hlm. 55

E. Ukuran Perusahaan

Secara umum ukuran dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Jika pengertian ini dihubungkan dengan perusahaan atau organisasi, maka ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai Suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi (Sholichah, 2015).⁶⁰Ukuran perusahaan terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*). dan perusahaan kecil (*small firm*).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aset, nilai pasar saham dan lain-lain (Prasetyorini. 2013).⁶¹ Ukuran perusahaan sangat berpengaruh dengan nilai perusahaan. Karena semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula nilai suatu perusahaan, yang memudahkannya untuk memperoleh pendanaan baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset ataupun total penjualan bersih. Semakin besar total aset maupun penjualan maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Semakin besar aset maka semakin besar modal yang ditanam sementara semakin banyak penjualan maka semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan.⁶²Adapun untuk mengukur ukuran perusahaan

⁶⁰ Heri, *Kajian Riset Akuntansi: Mengulas berbagai Hasil Penelitian Terkini dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2017), hlm. 11

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 11

⁶² *Ibid.*, hlm. 12

digunakan hitungan total aset perusahaan yang di logaritma naturalkan untuk mempermudah proses menghitung dalam penelitian.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aset)}$$

F. Penelitian Terdahulu

Telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul (Peneliti/tahun)	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Manajemen Laba Persusahaan yang masuk dalam <i>Jakarta Islamic Index</i> . (Eva Rosa Dewi S. Dan Moh. Khoirudin, 2016)	Regresi Linier Berganda	Dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
2	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> pada Manajemen laba di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2014. (Selvy Yulia Abdillah, 2015)	Regresi Linier Berganda	Komite audit, dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan manajerial berparuh negatif terhadap manajemen laba.

No.	Judul (Peneliti/tahun)	Metode Analisis	Hasil Penelitian
3	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Manajemen Laba di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012. (Tegar Rahardi dan Andri Prastiwi, 2014)	Regresi Linier Berganda	Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
4	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Manajemen Laba dengan Good Corporate sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI. (Hafidza Ulfa Almadara, 2017)	Regresi Linier Berganda	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dengan diperkuat dewan komisaris independen dan kualitas auditor sebagai variabel moderasi
5	Pengaruh <i>Financial Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Independensi Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di JII tahun 2004-2007. (Budi Upayarta, 2009)	Regresi Linier Berganda	<i>Financial leverage</i> dan komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba.
6	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Leverage</i> terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur di BEI. (Subhan, 2014)	Regresi Linier Berganda	Ukuran dewan komisaris dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan proporsi dewan komisaris independen dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap manajemen laba,

No.	Judul (Peneliti/tahun)	Metode Analisis	Hasil Penelitian
7	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012. (Niken Utami, 2014)	Regresi Linier Berganda	Leverage dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
8	Pengaruh <i>Financial Leverage</i> terhadap Manajemen Laba dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI. (Hafidza Ulfa Almadara, 2017)	Regresi Linier Berganda	Leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, diperkuat oleh proxy dewan komisaris independen dan kualitas auditor sebagai variabel moderasi.
9	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Earning Management</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013 – 2015) (Taufik Hidayat, 2014)	Regresi Linier Berganda	Ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, tetapi secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
10	Pengaruh Good Corporate Governance dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). (Annisa Aurora, 2017)	Regresi linier berganda	Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, Komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

No.	Judul (Peneliti/tahun)	Metode Analisis	Hasil Penelitian
11	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Reputasi Kantor Akuntan Publik dan Kompensasi Bonus terhadap Manajemen Laba. (Handhani Nazir, 2014)	Regresi linier berganda	Kepemilikan institusional, reputasi kantor akuntan publik dan kompensasi bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.
12	Pengaruh Faktor <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Free Cash Flow</i> , dan <i>Leverage</i> Terhadap Manajemen Laba. (Dian Agustia, 2013)	Regresi linier berganda	Good corporate governance tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. <i>Free cash flow</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap manajemen laba
13	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba Per-bankan yang terdaftar di BEI. (R. Anastasia Endang Susilawati dan Nanang Purwanto, 2015)	Regresi Linier Berganda	Kepemilikan institusi, dewan komisaris independen, komite audit, leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun secara bersama-sama hanya komite audit yang berpengaruh terhadap manajemen laba.
14	The Effect of Good Corporate Governance Mechanism to earning Management Before and After IFRS Convergence. (Elvira Luthan, Ileh Satria dan Ilmainir, 2015)	Regresi linier berganda	Dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba baik sebelum ataupun sesudah IFRS. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan sebelum IFRS, dan berpengaruh negatif tidak signifikan setelah IFRS. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif sebelum IFRS dan berpengaruh positif tidak signifikan setelah IFRS

Sumber: Data diolah

G. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana *good corporate governance*, *financial leverage* dan ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap manajemen laba. Berikut pengembangan hipotesis dalam penelitian ini:

1. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba

Good corporate governance (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.⁶³ Pada penelitian ini digunakan 5 alat ukur *good corporate governance*.

a) Ukuran dewan komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.⁶⁴ Salah satu pendapat menyatakan bahwa semakin banyak personel yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada semakin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan, Semakin banyaknya anggota dewan komisaris maka badan ini akan menjalani kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan

⁶³ Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 2

⁶⁴ Undang-undang no. 40 tahun 2007 *tentang Perseroan terbatas*, pasal 1 ayat 6

yang berguna bagi perusahaan (Yermack, 1996)⁶⁵. Hal ini membuat dewan komisaris kurang efektif dalam mengurangi manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyarso Herlambang dan Darsono (2015)⁶⁶, menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menjelaskan bahwa semakin banyak anggota dewan komisaris tidak akan memperbesar kemungkinan terjadinya manajemen laba. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Hal.1: Good corporate governance dengan alat ukur ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba.

b) Dewan komisaris independen

Menurut Ujiyantho dan Pramuka (2007)⁶⁷, kuatnya kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak independen. Fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab anggota dewan menjadi tidak efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Eva Rosa Dewi S. dan Moh. Khoirudin (2016)⁶⁸, menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen

⁶⁵ Taufik Hidayat, *Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Earning Management (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013 – 2015)*, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 28

⁶⁶ Setyarso Herlambang dan Darsono, *Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba*, Jurnal Akuntansi, vol. 4, no. 3 tahun 2015, hlm. 1-11

⁶⁷ Eva Rosa Dewi S. dan Moh. Khoirudin, *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba pada perusahaan yang masuk dalam JII*, Jurnal analisis manajemen, vol. 5, no. 3 tahun 2016, hlm. 163

⁶⁸ Ibid., hlm. 163

laba. Penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan sekedar untuk memenuhi ketentuan formal saja tidak dimaksudkan untuk menegakkan *good corporate governance*, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan tidak meningkat atau bahkan menurun. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Hal.2: Good corporate governance dengan alat ukur dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba

c) Komite Audit

Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.⁶⁹

Peneliti yang dilakukan oleh Ira Heni Ningrum Sari (2017)⁷⁰, menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil ini terjadi karena adanya kemungkinan bahwa pembentukan komite audit dalam perusahaan didasari sebatas untuk memenuhi regulasi dari peraturan otoritas jasa keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan

⁶⁹ Mohammad Samsul, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, (Surabaya: Erlangga, 2006), hlm.72

⁷⁰ Ira Heni Ningrum Sari, *Pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan leverage terhadap manajemen laba*, Jurnal skripsi, 2015, hlm. 12

kerja komite audit yang mensyaratkan perusahaan mempunyai komite audit yang paling sedikit terdiri dari seorang komisaris independen. Berdasarkan hasil dari penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Hal.3: Good corporate governance dengan alat ukur komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

d) Kepemilikan Institusional

Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan.⁷¹

Penelitian yang dilakukan oleh Yayan Sudyanto (2016)⁷², menunjukkan adanya pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Kepemilikan saham institusional yang besar membuat investor mempunyai kekuatan yang lebih dalam melakukan kontrol terhadap kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan hasil penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

⁷¹ Subagyo, Nur Aini Masruroh dan Indra Bastian, *Akuntansi Manajemen Berbasis Desain*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 46

⁷² Yayan Sudyanto, *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba pada perusahaan yang masuk dalam JII*, Jurnal analisi manajemen, vol. 5, no. 3 tahun 2016, hlm. 163

Hal.4: Good corporate governance dengan alat ukur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba.

e) Kepemilikan Manajerial

Peningkatan kepemilikan manajerial dalam perusahaan mendorong manajer untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer bertindak secara hati-hati, karena mereka ikut menanggung konsekuensi atas tindakannya⁷³. Penelitian yang dilakukan oleh Mauliridiyah Sevilia Putri (2014)⁷⁴, menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen laba, yang berarti semakin besar struktur kepemilikan manajerial maka akan meningkatkan praktik manajemen laba yang semakin oportunistik.

Penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Gede Pingga Mahariana dan I Wayan Ramantha (2014)⁷⁵, menunjukkan pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Hasil ini membuktikan dengan adanya peningkatan kepemilikan saham oleh manajer dalam perusahaan akan mampu untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer dalam bertindak agar lebih berhati-hati, karena mereka ikut menanggung konsekuensi dari setiap tindakan yang

⁷³ Yayan Sudiyanto, Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Leverage terhadap Manajemen Laba dan Konsekuensinya terhadap Nilai Perusahaan, Skripsi, (Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu), hlm. 27

⁷⁴ Mauliridiyah Sevilia Putri, *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap manajemen laba Perusahaan Food and Beverage di BEI periode 2008-2013*, Jurnal Management, vol. 1, no. 3 tahun 2014, hlm. 238-253

⁷⁵ I Dewa Gede Pingga Mahariana dan I Wayan Ramantha, *Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional pada Manajemen Laba Perusahaan di BEI*, Jurnal Akuntansi, vol. 7, no. 2 tahun 2014, hlm. 519-528

dilakukannya. Berdasarkan hasil penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Ha1.5: Good corporate governance dengan alat ukur kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba.

2. Pengaruh *Financial Leverage* terhadap Manajemen Laba

Financial Leverage adalah penggunaan sumber dana yang menimbulkan beban tetap keuangan.⁷⁶ Menurut husnan (2001)⁷⁷ menyatakan bahwa *leverage* yang tinggi yang disebabkan kesalahan manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan atau penerapan strategi yang kurang tepat dari pihak manajemen. Oleh karena kurangnya pengawasan yang menyebabkan *leverage* yang tinggi, juga akan meningkatkan tindakan *opportunistic* seperti manajemen laba untuk mempertahankan kinerjanya di mata pemegang saham dan publik.

Mengacu pada hipotesis yang melatar belakangi tindakan manajemen laba yaitu *debt covenant hypothesis* yang menyatakan bahwa jika suatu perusahaan menyimpang perjanjian hutang yang telah dibuat berdasarkan laba akuntansi, maka semakin besar kemungkinan manajemen perusahaan memilih prosedur akuntansi menggeser laba akuntansi dari periode mendatang ke periode sekarang.

⁷⁶ Agnes Sawir, *Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasi Perusahaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2004), hlm. 10

⁷⁷ Husnan, *Manajemen Keuangan :Teori dan Penerapan Keputusan Jangka Panjang*. (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 36

Penelitian yang dilakukan oleh Hafidza Ulfa Almadara (2017)⁷⁸, menunjukkan adanya pengaruh negatif leverage terhadap manajemen laba, semakin tinggi *leverage* maka akan menurunkan manajemen laba. Penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahiswari dan Nugroho (2014)⁷⁹, bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi akan menjadikan pihak manajemen perusahaan menjadi lebih sulit dalam membuat prediksi jalannya perusahaan ke depan. Semakin besar utang yang dimiliki perusahaan maka semakin ketat pengawasan yang dilakukan oleh kreditor, sehingga fleksibilitas manajemen untuk melakukan manajemen laba semakin berkurang. Berdasarkan hasil dari peneliti terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Ha2: Financial Leverage berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Menurut Prasetyorini (2013)⁸⁰, ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aset, nilai pasar saham dan lain-lain. Ukuran perusahaan dapat menentukan banyak sedikitnya praktik manajemen laba perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang relatif besar akan dilihat kinerjanya oleh publik sehingga perusahaan tersebut akan

⁷⁸ Hafidza Ulfa Almadara, *Pengaruh Financial Leverage terhadap Manajemen Laba dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), hlm.86

⁷⁹ Raras Mahiswari dan Paskah Ika Nugroho, *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, vol. 17, no. 1 tahun 2014, hlm 1-21

⁸⁰ Heri, *Kajian Riset Akuntansi: Mengulas berbagai Hasil Penelitian Terkini dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2017), hlm. 11

melaporkan kondisi keuangannya dengan lebih berhati - hati, lebih menunjukkan keinformatifan informasi yang terkandung di dalamnya, dan lebih transparan.

Oleh karena itu, perusahaan lebih sedikit dalam melakukan praktik manajemen laba. Sedangkan perusahaan yang mempunyai ukuran yang lebih kecil mempunyai kecenderungan untuk melakukan manajemen laba dengan melaporkan laba yang lebih besar untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang memuaskan. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Adhi Pradumitha (2017)⁸¹ menunjukkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar perusahaan yang diukur dengan total aset, akan menyebabkan berkurangnya tindakan manajemen laba.

Penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alesia Heni Sylviana (2017)⁸², dimana perusahaan besar akan lebih menurunkan praktik manajemen laba, karena lebih mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil dari peneliti terdahulu, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

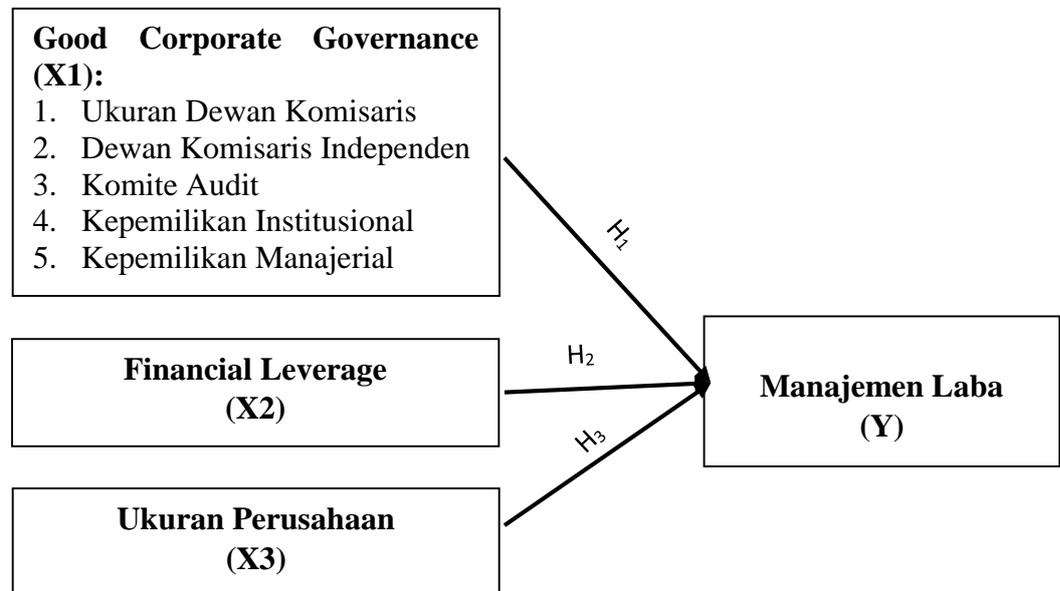
Ha3: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

⁸¹ Yusuf Adhi Pradumitha, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan Institusi terhadap Manajemen Laba, Jurnal skripsi, 2017, hlm. 12

⁸² Alesia Heni Sylviana, Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba, Skripsi, 2017, hlm. 57

H. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Pengembangan Hipotesis.

